

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, 2007. *Pemberantasan Korupsi, melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bryan A. Garner. 2009. *"Blacks Law Dictionary"*.9th Edition, Washington: West Publishing Co.
- Elwi Danil, 2011. *Korupsi: Konsep. Tindak Pidana. Dan Pemberantasannya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Henry Campbell Black, M.A, 1968. *Black's Law Dictionary Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*. West Publishing Company.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- Lamintang, 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*.Bandung: Sinar Baru.
- Mahrus Ali, 2013. *Asas,teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta: UII Press.
- Marwan Effendi, 2012. *Kapita Selekta Hukum Pidana (Perkembangan dan Isu Aktual dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi)*. Jakarta: Referensi.
- Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muladi, 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Moeljatno, 1983. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Oemar Seno Adji dan Insriyanto Seno Adji, 2007. *Peradilan Bebas dan Contempt of Court*. Jakarta: Diadit Media.

Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

R Wiyono, 2010, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Roeslan Saleh, 2003. *Perbuatan tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.

Shant Dellyana, 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Soerjono Soekanto, 2009. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Yudi Kristina, 2016. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafamedia.

Yudi Kristiana, 2018. *Teknik Penyidikan dan Pemberkasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Thafa Media.

Zainuddin Ali, 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru.

Jurnal

Ade Mahmud, 2021. "Problematika Penerapan Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Kepastian Hukum". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol.10.No. 1.2021

Ade Mahmud, 2021. "Kualifikasi dan Implikasi Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi". *Journal on Law Review*. Vol. 21. No.1. 2021.

Difia Setyo, 2022. "Karakteristik Perbuatan Advokat yang Termasuk Tindak Pidana Obstruction of Justice". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 4. No. 1. 2022.

Genoveva Puspitasari Larasati, 2021. "Comparison of Law in Indonesia and Singapore Concerning The Eradication of Criminal Acts of Corruption". *International Journal of Business, Economics, and Law*. Vol. 25. No. 2. 2021.

Hafrida, 2013. "Analisis Yuridis Terhadap Gratifikasi dan Suap sebagai Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang PTPK". *Jurnal UNJA*. Vol. 6. No. 7. 2013.

Junianto, 2019. *Obstruction of Justice* dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Media Juris*. Vol. 2. No. 3. 2019.

- Junianto, 2019. "Kriminalisasi Profesi dalam Tindak Pidana Obstruction of Justice: Studi Komparatif Indonesia-Amerika Serikat". *Jurnal Hukum Pidana Khusus*. Vol. 12 No. 4. 2019.
- Markhy S Gareda, 2015. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Menghalangi Proses Peradilan dalam Perkara Korupsi". *Jurnal Hukum Pidana*. Vol.5. No.2. 2015.
- Markhy S Gareda, 2015. Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 juncto UU No 20 Tahun 2001. *jurnal Lex Crimen*. No.1 Vol.4.136. 2015.
- Mohd. Yusuf DM, Mangaratua Samosir, dan Asmen Ridhol, 2023. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. Vol.5. No.2. 2023.
- Nicken Sarwo Rini, 2018. "Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" *Jurnal De Jure*. Vol.18. No. 2. hlm. 258.
- Purnomo, 2018. "Hambatan Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Illegal Logging(Studi Pada Kepolisian Sektor Konda Resort Kota Kendari)". *SELAMI IPS*. Vol. 4. No.48. hlm.395. 2018.
- Tarek, 2019. Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan Sampai Peradilan dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*. Vol. 8. No.2. 2019.
- Tarek, 2019. "Implementasi Obstruction of Justice dalam Penegakan Hukum Korupsi: Analisis Kritik terhadap Pasal 21 UU PTPK". *Jurnal Antikorupsi*. Vol. 8. No. 3. 2019.

Tulandi, 2015. Menghalangi Penyidikan dan Penuntutan untuk Kepentingan Orang Lain Menurut Pasal 221 ayat (1) KUHPIDANA. *Lex Crimen*. Vol. 4. No. 6. 2015.

Yaqin, Ablisar, Hamdan, dan Mulyadi, 2023. "Urgensi Pemusatan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pada Tingkat Polres Dikaitkan dengan Tugas dan Fungsi Polri dalam Mengayomi, Melayani, dan Melindungi Masyarakat" (Studi Pada Polrestabes Medan). *Locus Journal of Academic Literature*. Vol. 5. No.2. 2023.

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Pengadilan. Nomor 3351 K/Pid.Sus/2018

Putusan Pengadilan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019

Putusan Pengadilan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/Pt DKI

Putusan Pengadilan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst

Internet

Irfan Kamil, "*Tim Hukum Ungkap Isi Surat Dakwaan Hasto: Hanya Satu Halaman yang Baru*", <https://nasional.kompas.com/> dikunjungi pada tanggal 13 Maret 2025 jam 02.47 WIB.

Ariana Cubillos, "*Human Rights Watch-Venezuela*", <https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/venezuela>, dikunjungi pada tanggal 5 Mei 2025 Jam 16.04 WIB.

Thuraisingam LLP, “ A closer look at the offence of Obstruction of Justice in Singapore (Section 204A Penal Code) “, [A closer look at the offence of Obstruction of Justice in Singapore \(Section 204A Penal Code\)](#), dikunjungi pada tanggal 23 Juli 2025 Jam 14.35 WIB

Corrupt Practices Investigation Bureau, "Singapore's Corruption Control Framework," [Singapore's Corruption Control Framework](#), dikunjungi pada tanggal 15 Agustus 2025 Jam 01.55 WIB

Corrupt Practices Investigation Bureau, "Official Statement on Anti-Corruption Enforcement", [Singapore's Corruption Control Framework](#), dikunjungi pada tanggal 18 Agustus 2025 Jam 10.15 WIB

CPIB Swift and Sure, “Police Officer Sentenced To 78 Months Imprisonment“ <https://www.cpi.gov.sg/press-room/press-releases/police-officer-sentenced-to-78-months-imprisonment/>, dikunjungi pada 1 November 2025 jam 12.03

SG Courts, “ S Iswaran v Public Prosecutor ” <https://www.judiciary.gov.sg/judgments/case-briefs-by-smu/s-iswaran-v-public-prosecutor>, dikunjungi pada tanggal 12 Agustus 2025 jam 00.27

BH SG “Police officer jailed for more than 6 years for accepting bribes, obstructing arrest” <https://www.beritaharian.sg/singapura/pegawai-polis-dijel-lebih-6-tahun-kerana-terima-rasuah-halang-tangkapan>, diakses pada tanggal 5 September 2015 jam 10.05

CNA “Polisi yang terima suap dan halangi penyidikan divonis 78 bulan penjara” <https://www.channelnewsasia.com/singapore/poo-tze-chiang-police-officer-bribes-corruption-obstruct-justice-4549996>, dikunjungi pada tanggal 12 Agustus 2025 jam 03.25

CPIB Swift and Sure, “Police Officer Sentenced To 78 Months Imprisonment“

<https://www.cpi.gov.sg/press-room/press-releases/police-officer-sentenced-to-78-months-imprisonment/>, dikunjungi pada 1 November 2025 jam 12.03

Prime Minister’s Office Singapore “Pernyataan PM Lawrence Wong tentang Hukuman terhadap Tuan S Iswaran”

<https://www.pmo.gov.sg/newsroom/statement-by-pm-lawrence-wong-on-the-sentencing-of-mr-s-iswaran/>, dikunjungi pada tanggal 15 November 2025 jam 02.47

